

ANALISIS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) PEMERINTAH KOTA SABANG

Irsyadi¹, Darwanis², Muhammad Arfan

¹⁾ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²⁾ Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstract: *An important aspect for the purpose of regional autonomy can be achieved by improving the performance of local governments. Performance Government Agencies (SKPK) as units of local government strongly contribute to the achievement of development and improvement of services to the community. Performance is an overview of the level of achievement of the implementation of an activity, program or policy in achieving the goals, objectives, mission and vision of the organization as stated in the strategic planning of an organization. This study aims to analyze the performance of Government Agencies in the government of Sabang Municipality. This research uses descriptive analysis method. The population in this study is the whole Government Agencies in the Sabang government municipality (34 Government Agencies). In measuring scores on respondents by comparing the actual score with the ideal score to earn a percentage of the actual score. The results of this study indicate that the performance of Government Agencies in the Sabang Municipality can be expressed well, based on analysis of indicators of input, output and outcome.*

Keywords: *performance, input, output and outcome*

Abstrak: Aspek penting agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kinerja SKPK selaku unit kerja pemerintah daerah sangat berkontribusi pada pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Sabang (34 SKPK). Dalam mengukur skor atas tanggapan responden yaitu dengan membandingkan skor aktual dengan skor ideal sehingga mendapatkan persentase skor aktual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja SKPK pada Pemerintah Kota Sabang dapat dinyatakan baik, berdasarkan analisis terhadap indikator input, output dan outcome.

Kata kunci: kinerja, masukan, keluaran dan hasil

PENDAHULUAN

Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 1999). Mengingat hal tersebut maka keluarlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-Undang tersebut menjadikan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan berdasarkan asas otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU/32/2004). Sistem desentralisasi tersebut pemerintah daerah berwenang dalam memformulasikan kebijakan di daerah dan menjadi ujung tombak

dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (**Indonesia governance index, 2013: 18**).

Desentralisasi juga merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002:1). Yang terpenting dari desentralisasi adalah memungkinkan pemerintah bawahan/ pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sendiri daerahnya sesuai dengan kondisi/budaya daerah tersebut, dimana dengan sistem sentralistik hal ini tidak dapat terwujud.

Ironisnya pemerintah daerah belum mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, setelah lebih kurang 16 tahun otonomi daerah sudah berjalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dan tuntutan dari masyarakat terkait peningkatan/perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Sudah sewajarnya masyarakat menuntut pemerintah agar memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil penelitian Indonesian Governance Index (2013: 45) menyatakan bahwa rata-rata nasional kinerja tata kelola

pemerintahan daerah hanya mencapai nilai 5,70 dari nilai maksimum 10. Hal ini membuktikan kondisi kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia masih jauh dari harapan.

Demikian juga dengan Pemerintah Kota Sabang, rendahnya kinerja tercermin dari sering terlambatnya pengesahan anggaran. Pengesahan anggaran sering terjadi dalam tahun berjalan seperti anggaran Tahun 2014 di sahkan tanggal 16 Januari Tahun 2014 dan anggaran Tahun 2015 di sahkan tanggal 29 Januari Tahun 2015. Seharusnya pengesahan anggaran paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya (Permendagri No. 13/2006).

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terlalu tinggi yang merupakan dampak dari rendahnya serapan anggaran pada unit-unit kerja Pemerintah Kota Sabang. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 5 SKPK Tahun Anggaran 2014 dan 2015 terdapat 2 Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), yang anggarannya baru terealisasi 7-8%. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung (BTL) atau belanja pegawai, hal ini membuktikan rendahnya kinerja SKPK.

Dampak negatif dari rendahnya serapan anggaran pada unit kerja pada pemerintah daerah yaitu: Pertama, tidak efektif kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kedua, manfaat belanja menjadi hilang, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga terjadi *idle money*. Ketiga, terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan

penanggulangan kemiskinan. Keempat, penumpukan anggaran dan tagihan pada akhir tahun anggaran, tidak baik bagi manajemen kas pemerintah daerah (Seftianova dan Adam, 2013). SiLPA yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa dana publik yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan layanan publik (Dirjen perimbangan keuangan, 2013: 11).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) pada Pemerintah Kota Sabang dengan pendekatan studi literatur, sehingga dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dimulai dengan membahas kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kinerja merupakan capaian dari hasil kerja. Mahsu (2006: 4) mendefinisikan Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, pasal 1 ayat 35 dinyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPK dilakukan

untuk menilai seberapa baik SKPK tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) berfungsi untuk: 1). Menciptakan transparansi (*creating transparency*), pengukuran kinerja mengarah pada transparansi dengan demikian dapat berperan dalam proses akuntabilitas. Sebuah organisasi dapat menjelaskan produk apa yang dihasilkan dengan melalui suatu analisis *input-output* dan jumlah biaya yang digunakan. 2). Belajar (*learning*), sebuah organisasi mengambil langkah lebih lanjut ketika menggunakan kinerja pengukuran untuk belajar. Berkat transparansi dibuat, sebuah organisasi bisa belajar dengan baik untuk melakukan perbaikan. 3). Penilai (*appraising*), sebuah penilaian berbasis kinerja sekarang dapat diberikan dapat di sediakan oleh manajemen organisasi tentang kinerja sebuah organisasi. 4). Sanksi (*sanctions*), akhirnya penilaian kinerja dapat diikuti oleh sanksi positif ketika kinerja yang baik, atau dengan sanksi negatif ketika kinerja tidak cukup. Sanksi dapat berupa keuangan tetapi mungkin juga sanksi jenis lain yang mungkin (De Bruijn, 2007: 8). Pengukuran kinerja bermanfaat dalam membawa organisasi ke arah perbaikan.

Dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan indikator seperti dinyatakan oleh Darise (2008: 130) adalah 1). Masukan (*input*), merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu,

teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan. 2). Keluaran (*output*), merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. 3). Hasil (*outcome*), merupakan ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4). Manfaat (*benefit*), merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. 5) Dampak (*impact*), merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Laporan *Local Governance Support Program Finance and Budgeting Team* (2009) jenis indikator kinerja dibagi 2 (dua) yaitu, tolok ukur jangka pendek yaitu *Input*, *output* dan *outcome* dan tolok ukur jangka panjang yaitu *benefit* dan *impact*.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M. PAN/5/2007, pasal 5 huruf (c) menyatakan bahwa indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Mengacu pada PER/09/M. PAN/5/2007, maka indikator yang digunakan dalam menganalisis kinerja SKPK menggunakan *input*, *output* dan *outcome* (indikator jangka pendek).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur dan membandingkannya dengan kondisi yang terjadi pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh SKPK di lingkungan Pemda Sabang (34 SKPD).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung pada responden. Data sekunder mengacu pada laporan-laporan yang terkait penelitian seperti laporan realisasi anggaran dan peraturan-peraturan daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Dalam mengukur skor atas tanggapan responden mengacu pada teori Hewlett-Packard dalam Narismawati (2007: 82) yaitu dengan membandingkan skor aktual dengan skor ideal sehingga mendapatkan persentase skor aktual. Skor aktual merupakan jumlah jawaban responden atas kuesioner yang diajukan, sedangkan skor ideal adalah semua responden diasumsikan menjawab dengan skor tertinggi dikalikan jumlah kuesioner, dalam penelitian ini menggunakan skor tertinggi adalah 4 (empat). Untuk mengambil kesimpulan, terkait baik tidaknya kondisi kinerja SKPK mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Narimawati, (2007: 84) seperti pada tabel 1.

Tabel 1
Kriteria Persentase Skor Tanggapan
(Aktual) terhadap Skor Ideal

% Jumlah Skor	Kriteria
20.00-36.00	Tidak Baik
36.01-52.00	Kurang Baik
52.01-68.00	Cukup
68.01-84.00	Baik
84.01-100	Sangat Baik

Sumber: Narimawati (2007: 84)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan responden terhadap kinerja SKPK pada Pemerintah Kota Sabang di sajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Tanggapan Responden terhadap Kinerja
SKPK

Unit Analisis (SKPK)	Jumlah Skor	% Skor Aktual
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50	78.1
Badan Lingkungan Hidup	52	81.3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62	96.9
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48	75.0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	64	100.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	61	95.3
Dinas Pendidikan	48	75.0
Dinas Kesehatan	62	96.9
Dinas Pekerjaan Umum	37	57.8
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	57	89.1
Dinas Syariah Islam	47	73.4
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan,	37	57.8

dan Kehutanan		
Dinas Kelautan dan Perikanan	62	96.9
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	54	84.4
Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan	52	81.3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	50	78.1
Inspektorat	62	96.9
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51	79.7
Dinas Pemuda dan Olahraga	59	92.2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49	76.6
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	61	95.3
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	53	82.8
Kecamatan Sukakarya	62	96.9
Kecamatan Sukajaya	62	96.9
Rumah Sakit Umum Daerah	38	59.4
Sekretariat Daerah	61	95.3
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	58	90.6
Sekretariat KORPRI	38	59.4
Sekretariat Majelis Adat Aceh	56	87.5
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	60	93.8
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	62	96.9
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	50	95.3
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	55	85.9
Sekretariat Baitul Mal	50	78.1
Total	1.841	84.6

Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa SKPK dengan skor antara 84.01- 100.0

untuk seluruh pernyataan terhadap kinerja SKPK sebanyak 19 SKPK yaitu: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 4) Dinas Kesehatan, 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 6) Dinas Kelautan dan Perikanan, 7) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 8) Inspektorat, 9) Dinas Pemuda dan Olahraga, 10) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, 11) Kecamatan Sukakarya, 12) Kecamatan Sukajaya, 13) Sekretariat Daerah, 14) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, 15) Sekretariat Majelis Adat Aceh, 16) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, 17) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, 18) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dan 19) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Narimawati (2007: 84) dapat dinyatakan bahwa kinerja terhadap 19 SKPK dapat dinyatakan sangat baik yang didasarkan pada penerapan indikator-indikator kinerja.

SKPK dengan skor antara 68.01- 84.00 untuk seluruh pernyataan terhadap kinerja SKPK sebanyak 11 SKPK yaitu 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2) Badan Lingkungan Hidup, 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 4) Dinas Pendidikan, 5) Dinas Syariat Islam, 6) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan, 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 10)

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan 11) Sekretariat Baitul Mal. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Narimawati (2007: 84) dapat dinyatakan bahwa kinerja terhadap 11 SKPK adalah baik yang didasarkan pada penerapan indikator-indikator kinerja.

SKPK dengan skor antara 52.01-68.00 untuk seluruh pernyataan terhadap kinerja SKPK sebanyak 4 SKPK yaitu 1) Dinas Pekerjaan Umum, 2) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan, 3) Rumah Sakit Umum Daerah, 4) Sekretariat KORPRI. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja terhadap 4 SKPK dapat dinyatakan cukup, berarti kinerja atas 4 SKPK tersebut perlu ditingkatkan sehingga kinerja SKPK tersebut menjadi lebih baik.

Untuk keseluruhan unit analisis (SKPK) diperoleh Skor aktual sebesar 84.60. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPK secara keseluruhan pada Pemerintah Kota Sabang dapat dinyatakan sangat baik, berdasarkan penilaian terhadap indikator kinerja yaitu *input*, *output* dan *outcome*.

Untuk melihat secara jelas deskriptif responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner terhadap kinerja SKPK disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Jawaban Responden tentang Kinerja SKPK

Item Pernyataan	Rata-rata
Plafon anggaran untuk SKPK memadai untuk membiayai program kegiatan yang direncanakan.	3.50

Penyusunan program/kegiatan SKPK memperhatikan visi dan misi sebagai acuan.	3.38
Penyusunan program/kegiatan SKPK setiap tahunnya sesuai dengan instruksi pimpinan SKPK.	3.71
Perencanaan prioritas kinerja SKPK menggunakan prinsip efisiensi dalam penganggaran.	3.09
Sumber daya manusia pada SKPK memadai untuk menyelesaikan penyusunan rencana kerja anggaran tepat waktu.	3.53
SDM pada SKPK handal dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada peraturan yang ada.	3.18
Setiap program/kegiatan pada SKPK terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.	3.35
Anggaran semesteran pada SKPK terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan.	3.41
Realisasi anggaran SKPK melebihi 90% pada akhir tahun anggaran.	3.47
Semua kegiatan SKPK terlaksana meskipun ada perubahan regulasi terjadi pada tahun berjalan.	3.41
Program kegiatan pada SKPK terlaksana dengan berdasarkan prinsip <i>value for money</i> .	3.21
Program/kegiatan yang telah selesai pada unit kerja dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen lengkap sesuai peraturan yang berlaku.	3.44
Program/kegiatan yang selesai dilaksanakan SKPK pada tahun lalu, tidak di usulkan kembali dengan kegiatan yang sama tahun depan oleh masyarakat dalam musrembang.	3.35
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kinerja SKPK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.	3.44
Kegiatan SKPK yang tidak memberikan hasil yang baik disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang.	3.35
Permasalahan hukum terhadap	3.32

pelaksanaan kegiatan pada SKPK muncul akibat dari lemahnya pemahaman pelaksana teknis terhadap regulasi.	
Rata-rata jawaban terhadap kinerja SKPK	3,38

Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap item-item pernyataan kinerja SKPK adalah 3,38. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Sabang secara keseluruhan sudah baik.

Masukan (*input*)

Masukan (*Input*) adalah semua jenis sumber daya masukan yang dilakukan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2013: 98). Input tersebut dapat berupa orang (tenaga, keahlian dan ketrampilan), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (hardware dan software) dan bahan baku untuk proses. SDM merupakan kunci utama yang terpenting dalam *input*. Manusia merupakan perencana sekaligus penentu terjadinya proses yang menentukan kinerja (Tangkilisan, 2007: 12).

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator *input* (item pernyataan pertama sampai dengan keenam) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi *input* yaitu terkait SDM, ketersediaan dana, infrastruktur/peralatan dan juga teknologi pada SKPK sudah sangat memadai untuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelesaian tugas dan fungsi SKPK Pemerintah Kota Sabang.

Keluaran (*output*)

Keluaran (*output*) merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan (Darise, 2008: 130). *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses (Mahmudi, 2013: 99). Sebagai contoh dari *output* suatu SKPK adalah jumlah jalan yang dihasilkan, jumlah Qanun yang dihasilkan oleh legislatif dan lainnya. Keluaran atau produk yang dihasilkan tersebut harus terukur sesuai dengan input yang tersedia. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas organisasi sektor publik yang terbentuk dalam jumlah unit fisik. *Output* yang baik memenuhi dimensi ukuran kinerja umumnya meliputi: kuantitas, kualitas, waktu (*timeframe*), lokasi, dan biaya.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator keluaran (*output*) (item pernyataan ketujuh sampai dengan kedubelas) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,38. Hal ini menunjukkan bahwa keluaran atau produk yang dihasilkan oleh SKPK sudah baik sesuai dengan kuantitas, kualitas, waktu (*timeframe*), lokasi, dan biaya pada Pemerintah Kota Sabang.

Hasil (*outcome*)

Outcome mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dapat berupa target kinerja

yang diharapkan, sedangkan *outcome* hasil nyata yang dicapai (Mahmudi, 2013: 99). Pengukuran *outcome* tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dari suatu program atau aktivitas ditetapkan, karena pengukuran *outcome* berupa perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Dalam pengukuran *outcome* membutuhkan waktu yang panjang karena melihat manfaat dari sebuah kegiatan atau program.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator *outcome* (item pernyataan ketigabelas sampai dengan enam belas) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,36. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan indikator kinerja *outcome* pada SKPK sudah baik artinya program/kegiatan yang dijalankan oleh SKPK pada Pemerintah Kota Sabang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja SKPK Pemerintah Kota Sabang berdasarkan masukan (*input*) dimana SDM, ketersediaan dana, infrastruktur/peralatan dan juga teknologi sudah memadai. Juga dari sisi keluaran (*output*) dimana produk dari program /kegiatan sudah sesuai dengan kuantitas, kualitas, waktu (*timeframe*), lokasi, dan biaya. Dari sisi indikator hasil (*outcome*) dimana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK pada Pemerintah Kota Sabang berdampak positif

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dinyatakan kinerja SKPK pada pemerintah Kota Sabang sudah baik. Hasil kesimpulan ini mengacu analisis terhadap indikator kinerja jangka pendek.

Keterbatasan

Kesimpulan diambil dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi jika jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Kondisi ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan karena di luar kemampuan peneliti.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja SKPK Pemerintah Kota Sabang ke arah yang lebih baik harus mempertimbangkan tiga hal yaitu: 1) *Input*, terkait peningkatan SDM dan penempatan sesuai dengan keahlian atau ilmu yang dimiliki, ketersediaan dana, infrastruktur/peralatan dan teknologi yang memadai untuk mendukung program kegiatan SKPK. 2) *Output*, yang dihasilkan harus sesuai dengan kuantitas, kualitas, waktu (*timeframe*), lokasi, dan biaya yang ada dalam standard Pemerintah Kota Sabang. 3) *Outcome*, harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks Publishing.
- De Bruijn, H. (2007). *Managing Performance in the Publik Sector*. 2nd Edition. New York: Rutledge.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2013). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah Khusus yang Berasal dari Penerimaan SILPA*. Jakarta: Direktorat Evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.
- Indonesia Governance Index 2012**. (2013).. *Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintah yang Responsif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- LGSP. (2009). *Contoh-contoh Indikator Kinerja untuk SKPD*. Local Governance Support Program. USID.
- Mahmudi. (2013: 99). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN
- Mardiasmo. (1999). *The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government Budgetary Management: The Case of Indonesia*. Ph.D Thesis (Unpublished).
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Narimawati, U. (2007). *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

_____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

_____, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.*

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Sidik, M. (2002) *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara teori dan aplikasinya di Indonesia).* Jakarta: DJPK RI

Seftianova, R., dan Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 4(1), 75 – 84.

Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen publik.* Edisi 2. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.